AREA 5
PENGUATAN PENGAWASAN

ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

5

PENGUATAN PENGAWASAN

Sigit Purnomo
Penanggung Jawab

Jefriyanto
Ketua

Sri Haryanti
Sekretaris

Hafidz Iksan B.
Sekretaris

Widy Hastowahyudi
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan

Nur Rakhman
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan

Bobi Arianto
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan

Lesmana Ramadon
Anggota Bidang Penguatan Pengawasan

ANGGOTA TIM KERJA AREA 5

DAFTAR ISI

1. Surat Tugas Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern
2. Undangan Pelatihan SPIP
3. Undangan Sosialisasi SPIP
4. Pedoman Teknis SPIP
5. Screenshot Aplikasi Checklist Pengendalian Di MK
6. Sistem Pengendalian Berjenjang

SURAT TUGAS
Nomor. 210/2000/06/2021

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dipandang perlu untuk menghadirkan narasumber dalam kegiatan tersebut;
b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a diatas, Sekretaris Jenderal perlu menerbitkan Surat Tugas kepada narasumber yang namanya ditunjuk dalam surat tugas tersebut;

Mengingat :
1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal mahkamah Konstitusi;
2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Memberi Tugas

Kepada :

NO	NAMA	JABATAN	INSTITUSI
1.	**Tri Handoyo**	Direktur Pengawaasan Bidaang Politik dana penegakan Hukum	BPKP
2.	**Didi Wahyudi**	Kasubdit Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	BPKP

Untuk :
1 Menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara virtual pada :

Hari /Tanggal : Selasa , 22 Juni 2020
Pukul : 13.00- Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lt 10 Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No 6 - Jakarta Pusat dan Kantor BPKP Pusat.

2 Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;

Jakarta, 22 Juni 2021
Sekretaris Jenderal ,
M. Guntur Hamzah

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi – Bogor 16720 Telp. (0251) 8249001-05
Faksimili (0251) 824986 e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id
Web: http://pusdiklatwas.bpkp.go.id

Nomor : S-1443/DL/4/2021 16 Juni 2021
Lampiran : Satu Set
Hal : Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Yth.
1. Inspektur Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga
2. Inspektur Kementerian/Lembaga

(lampiran I)
di Jakarta

Sesuai dengan Surat Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP Nomor S-299/D204/TU/2021 tanggal 2 Juni 2021 hal Usulan Peserta Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi, kami akan menyelenggarakan Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan peserta sebagaimana terlampir (lampiran II).

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelatihan tatap muka, kami perlu menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi:
   a. Data calon peserta agar di-*input* oleh admin unit kerja dalam aplikasi Registrasi *Online* BPKP pada alamat: http://registrasi.bpkp.go.id/registrasi dengan kode pelatihan 0362 paling lambat tanggal 17 Juni 2021.
   b. Peserta diwajibkan menyerahkan kepada panitia penyelenggara Surat Tugas mengikuti pelatihan dari pimpinan unit kerja (minimal Eselon II).
   c. Setelah teregistrasi, peserta melakukan *update* biodata dan mengunggah pas foto pada aplikasi *GIA Corpu Virtual Class/Dashboard* peserta dengan pas foto berlatar belakang merah, kemeja putih polos berlengan panjang dan memakai dasi (bagi pria). Bagi wanita berhijab, menggunakan hijab tanpa penutup wajah.
   d. Peserta membawa ST dan SPD Nihil mulai tanggal 20 s.d. 26 Juni 2021 dengan format sebagaimana terlampir (lampiran III). SPD mohon dicetak bolak-balik.
2. Penerapan Protokol Kesehatan
   a. Pada saat pembelajaran wajib menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
   b. Seluruh peserta akan di-*swab* antigen pada hari Minggu (20 Juni 2021) dan Jumat (25 Juni 2021).

3. Pembiayaan
   a. Seluruh biaya perjalanan dinas dan akomodasi peserta dibebankan pada DIPA STAR AF Pusdiklatwas BPKP Tahun 2021.
   b. Peserta pelatihan wajib menyerahkan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada *liaison officer* (LO) keuangan Pusdiklatwas BPKP pada hari pertama pelatihan.
4. Pelatihan akan diselenggarakan mulai tanggal 21 s.d. 25 Juni 2021 di Hotel The Mirah, Jalan Pangrango No. 9A, Bogor. Jadwal pelatihan sebagaimana terlampir (lampiran IV).
5. Peserta berhak memperoleh sertifikat mengikuti pelatihan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan minimal kehadiran sebanyak 90%.
6. Selama pelatihan berlangsung, peserta pria diwajibkan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana panjang berwarna gelap dan memakai dasi. Peserta wanita mengenakan baju warna putih berlengan panjang dan rok/bawahan berwarna gelap. Kecuali untuk hari Rabu, peserta menggunakan pakaian *smart casual*.
7. Peserta diharapkan sudah tiba dan melakukan registrasi dan *check in* di tempat pelatihan sehari sebelum pelaksanaan pelatihan sebagaimana jadwal pada poin 4.
8. Untuk mendukung kelancaran selama pelatihan, setiap peserta diharapkan membawa laptop.
9. Pelatihan akan dibuka pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 08.00 WIB, dan wajib dihadiri oleh peserta pelatihan.
10. Pelatihan akan ditutup pada hari Jumat, 25 Juni 2021, pukul 17.00 WIB, dan wajib dihadiri oleh peserta pelatihan.

Permintaan informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelatihan, dapat disampaikan melalui narahubung a.n. Sri Anggraini (HP. 0811-1113-916) dan Dwi Rahnyo (HP. 0877-8166-4140).

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA, CFE, CGCAE
NIP. 19661124 198703 1 001

Tembusan:
1. Sekretaris Utama BPKP selaku Penanggung Jawab STAR BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Lampiran
Surat Nomor: S- /DL/4/2021
Tanggal Juni 2021

DAFTAR PESERTA PELATIHAN
PELATIHAN PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI BAGI APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA
DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PIP BIDANG POLHUKAM PMK BPKP
21 - 25 JUNI 2021
(KELAS A)

NO	NAMA	NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	UNIT KERJA
1	Ardiles Ricky Susilo	19810813 200604 1 001	Kementerian Hukum dan HAM
2	Bambang Kurnia Eka P	11990041591277	Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat
3	Dian Ayu Pertiwi	19910518 201902 2 000	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
4	Dita Yufitasari	19940622 201903 2 013	Komisi Yudisial
5	Edion	65030716	Kepolisian RI
6	Edward P Sirait	68060360	Kepolisian RI
7	Egy Vasthy Puspasari	19891019 201012 2 000	Lembaga Ketahanan Nasional
8	Fadia Naufa Nasution	19930804 201902 2 005	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
9	Fani Febriany	0001775	Komisi Pemberantasan Korupsi
10	Foke	19950610 201903 1 001	Badan Intelijen Negara
11	Hafiz Pradana	0001786	Komisi Pemberantasan Korupsi
12	Haggai Kriston Ferdinal	19980205 202101 1 002	Badan Keamanan Laut
13	Hendra Irawan	19900716 200912 1 000	Badan Siber dan Sandi Negara
14	Hilda Juwita	19861010 201101 2 016	Kementerian Komunikasi dan Informasi
15	Muhammad Bramantyo	19950623 202012 1 012	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
16	Nopalisa Egitulas Vembilan	19791117 200312 2 001	Kementerian Hukum dan HAM
17	Oksianes Rein Hard Bawembang	19900905 202012 1 011	Badan Keamanan Laut
18	Rangga	19940629 201801 1 001	Badan Intelijen Negara
19	Rina Susilawati, Amd Mik.	11970029320974	Tentara Nasional Indonesia
20	Riswan Marhaen Renuat	19920901 201503 1 001	Mahkamah Agung RI
21	Risya Dameris	19851015 200912 2 004	Kementerian Komunikasi dan Informasi
22	Rizki Mardhatillah	19821022 200912 2 001	Kementerian Komunikasi dan Informasi
23	Sahreza Harahap	19841204 201503 1 001	Mahkamah Agung RI
24	Sapto Krisdiyanto	19971215 201812 1 001	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
25	Saudi Firmansyah Putra	531136	Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara
26	Surya Rendra	19890613 201503 1 004	Kementerian Hukum dan HAM
27	Syarifullah M. Nur	19880414 201503 1 001	Mahkamah Agung RI
28	Teguh Darmawan	19970314 201812 1 001	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
29	Tri Andayani	19790109 200312 2 001	Kementerian Hukum dan HAM
30	Wijang Ardi Rahmadi	19900627 201801 1 003	Mahkamah Konstitusi

Lampiran
Surat Nomor: S- /DL/4/2021
Tanggal Juni 2021

DAFTAR PESERTA PELATIHAN
PELATIHAN PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI BAGI APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA
DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PIP BIDANG POLHUKAM PMK BPKP
21 - 25 JUNI 2021
(KELAS B)

NO	NAMA	NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	UNIT KERJA
1	Aditya Ananda	19940928 201902 1 001	Kementerian Luar Negeri
2	Ahmad Fauzan Arrozi	19890523 201101 1 002	Sekretariat Jenderal DPD RI
3	Ali Gunawan	19821029 200912 1 002	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4	Angga Setiadi	19891109 201502 1 001	Ombudsman RI
5	Anindya Prestie O.	19961009 201812 2 003	Badan Pengawasan Pemilihan Umum
6	Arif Nahari	19660501 199203 1 004	Kementerian Sosial
7	Ayu Febriani Juwita Siregar	19920214 201502 2 001	Komisi Pemilihan Umum
8	Daniel Firdaus	19810525 201503 1 001	Sekretariat Jenderal DPD RI
9	Dewinta Diah Wismasari	19910418 202012 2 001	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
10	Endang Suryadi	19680215 198903 1 004	Kementerian Kesehatan RI
11	Ergad Putera G	080272	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
12	Friska Ernawati	19821124 200902 2 001	Badan Narkotika Nasional
13	Hendry Yuwono	19880310 201502 1 002	Ombudsman RI
14	Henny Setiawati	19830410 200501 2 002	Kejaksaan Agung
15	Heri Zulfikri	19890728 201403 1 001	Kejaksaan Agung
16	Jimmy Franky Wilson Taulo	19800121 200604 1 002	Kementerian Kesehatan RI
17	Kadek Indah Sulistyawati Supartha	19811111 201012 2 001	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
18	Leny Retnaningrum	19910801 201902 2 001	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
19	Margaretha Susanti	19820310 200312 2 002	Sekretariat Jenderal DPR RI
20	Mikael Abubakar	19940109 201903 1 001	Sekretariat Jenderal DPR RI
21	Oong Rusmana	19720108 199203 1 006	Kementerian Kesehatan RI
22	Osep Mulyani	19710426 199403 1 002	Kementerian Sosial
23	Puji Astuti Murti	19781126 200502 2 001	Sekretariat Jenderal MPR RI
24	Shalsabila	19960709 201812 2 001	Badan Pengawasan Pemilihan Umum
25	Tiara	080346	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
26	Tonggi Mulia Pandiangan	19931126 201902 1 004	Badan Narkotika Nasional
27	Urip Widodo	19870703 200912 1 003	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
28	Wardatul Mufidah	080059	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
29	Yudhi Yogaswara	19850205 201402 1 003	Komisi Pemilihan Umum
30	Yumeina Tiffani Husni	19920603 201801 2 002	Kementerian Luar Negeri

Lampiran
Surat Nomor: S- /DL/4/2021
Tanggal Juni 2021

DAFTAR PESERTA PELATIHAN
PELATIHAN PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI BAGI APIP KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA
DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PIP BIDANG POLHUKAM PMK BPKP
21 - 25 JUNI 2021
(KELAS C)

NO	NAMA	NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI	UNIT KERJA
1	Agus Sulisno	19780824 200501 1 001	Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	Budi Affandi	19730503 200801 1 013	Kementerian Agama
3	Deni Hidayat	19860522 201502 1 002	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
4	Diah Aristya Hesti	19880628 201903 2 007	Badan Standardisasi Nasional
5	Dian Ismiarti	19960112 201801 2 004	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6	Ellida Nuriya Putri	19950605 201803 2 001	Kemenristek/BRIN
7	Enggartias Wahana Putra	19880407 201502 1 002	Kementerian Sekretariat Kabinet
8	Ferdy Fristyansjah	19720413 199803 1 003	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9	Fitri Dwijayanti	19860608 200912 2 001	Badan Kepegawaian Negara
10	Fristyan Hangga PCPP	19901118 201503 1 002	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11	Gustanty Dian Fitrilia	19790817 200312 2 003	Kementerian Agama
12	Haris Agung Nugroho	19760517 201012 1 001	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
13	Husain Makhdum	19870903 200912 1 004	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
14	Isnandar Wahyudi	19640520 199003 1 000	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
15	Kartika Mayasari	19850402 200801 2 002	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Kustri Waluyo	19621203 199103 1 002	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Leli Astuti	19940303 202012 2 013	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
18	Lu'lu Nurrahiimah	19941226 201903 2 007	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Mahfudz Maulana Sahban	19860419 201101 1 012	Kementerian Agama
20	Marully Christi Yudo Nainggolan	19860803 201502 1 002	Lembaga Administrasi Negara
21	Mochammad Fachrul Rizal	19881211 201012 1 004	Badan Pengawas Obat dan Makanan
22	Moh. Nur Herman Syah	19830703 200712 1 001	Badan Pengawas Obat dan Makanan
23	Nadia Nurlailatusifa	19990308 202101 2 001	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Neni Setiawati	19850720 201012 2 001	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
25	Nur Asiah Amien	19840617 200901 2 001	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
26	Panji Satrio Widagdo	19891123 201503 1 002	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27	Restu Resmiati	19900605 201402 2 001	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
28	Sofie Yupitasari		Kementerian Sekretariat Negara
29	Sunarto	19720521 199903 1 003	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
30	Woro Pertiwi	19670618 199403 2 000	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lampiran

STAR
0362

JADWAL
Diklat Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputian Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (Batch II) (Tatap Muka)
Tanggal 21 Juni 2021 - 25 Juni 2021
Kelas A

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	MATA AJAR	JAMLAT	PENGAJAR
1	Senin	21 Juni 2021	08:00 - 08:30	Pembukaan dan Pre test		
			08:30 - 10:15	Dasar Hukum serta Manfaat Pembinaan dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.0	
			10:30 - 12:00	Overview Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2.0	
			13:00 - 17:00	Proses Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	5.0	
2	Selasa	22 Juni 2021	08:00 - 17:00	Penilaian Penetapan Tujuan	10.0	
3	Rabu	23 Juni 2021	08:00 - 17:00	Penilaian Struktur dan Proses	10.0	
4	Kamis	24 Juni 2021	08:00 - 17:00	Penilaian Kapabilitas APIP dan IEPK	10.0	
5	Jumat	25 Juni 2021	07:30 - 16:30	Penilaian Pencapaian Tujuan SPIP	10.0	
			16:30 - 17:00	Post test dan Penutupan		
TOTAL JAMLAT					**50**	

Keterangan:
Jam Istirahat:
I. 10.15 - 10.30 WIB (Hari Jumat : 09.45 - 10.00 WIB)
II. 12.00 - 13.00 WIB (Hari Jumat : 11.30 - 13.00 WIB)
III. 15.15 - 15.30 WIB

Tempat:
Bogor
(Hotel di Bogor)

CP: LO (No. HP:)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp. (0251) 8249001-5
Faksimili (0251) 8248986 e-mail: pusdiklatwas@pusdiklatwas.bpkp.go.id
Web:http://pusdiklatwas.bpkp.go.id

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
Nomor: SPD-...../DL/4/2021

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	Sisca Yulindrasari	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Superman / 19860729 200601 1 001	
3.	a. Pangkat Golongan b. Jabatan /Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Penata Tingkat I b. Auditor Muda c. C	
4.	Maksud perjalanan dinas	Mengikuti Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputian Bidang PIP Bidang Polhukam PMK BPKP	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Umum	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Jakarta b. Kota Bogor	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. 7 (tujuh) hari b. 20 Juni 2021 c. 26 Juni 2021	
		Tanggal Lahir	Keterangan
8.	Pengikut: Nama 1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan anggaran: a. Instansi b. Mata anggarn	a. Pusdiklatwas BPKP (STAR Loan ADB 2927-INO) b. 3674.FAC.230.SB.524119	
10.	Keterangan lain-lain	Sesuai Surat Tugas, ST-... / /2021 Tanggal ...2021	

Diterbitkan di :
Pada tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen

Sisca Yulindrasari
NIP 19750725 199502 2 001

	I. Berangkat : DKI Jakarta (tempat Kedudukan) Pada tanggal : 20 Juni 2021 Ke : Kota Bogor Atasan Langsung Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Nama Atasan Langsung NIP .....
II. Tiba di : Kota Bogor Pada Tanggal : 20 Juni 2021	Berangkat dari : Kota Bogor Ke : Jakarta Pada Tanggal : 26 Juni 2021
III. Tiba di Pada Tanggal	Berangkat dari Ke Pada Tanggal
IV. Tiba di Pada Tanggal	Berangkat dari Ke Pada Tanggal
V. Tiba di Pada Tanggal	Berangkat dari Ke Pada Tanggal
VI. Tiba kembali di : DKI Jakarta (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 26 Juni 2021 Atasan Langsung Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Nama Atasan Langsung NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen Sisca Yulindrasari NIP 19750725 199502 2 001
VII. Catatan lain-lain	
VIII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan - peraturan Keuangan Neg. apabila Negara menderita rugi akibat, kelalaian dan kealpaan (angka 8, lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanggal 30 April 1974 No. B. 296 / MK.I/1994).	

Catatan: warna merah diisi asal tempat peserta berangkat dan nama/NIP/jabatan atasan langsung peserta pelatihan.

Nomor : 418/PW.01/06/2021 21 Juni 2021
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Sosialisasi SPIP
Area RB : Pembangunan Zona Integritas

Kepada Yth.
1. Kepala Biro Humas dan Protokol
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
4. Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas di Tempat Daftar Undangan terlampir

di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, khususnya persiapan pengajuan predikat WBK/WBBM bagi unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), yang akan dilaksanakan secara virtual pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juni 2021
Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat : Dikantor /kediaman masing – masing

Untuk *Link* dan *password* meeting akan kami informasikan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur
Budi Achmad Djohari

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal MKRI.

Beran | Email | Sisten | Sisten | Sisten | Sis | Whats | Kursu | E-Lea | Dashb | Dashb | perbe | Gratif | My Pr
sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=428.070921032737

4	23-06-2022 11:58:59	Pengelola Instalasi TI (Agung Wisnu Laksono, A.Md.)	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi ***Tembusan :*** Pranata Komputer Muda (Sri Haryanti),Pranata Komputer Ahli Pertama (Tarnoto),Kepala Subbagian Tata Usaha TIK	Teruskan	Akses sudah diberikan kepada user yang bersangkutan	
5	23-06-2022 11:52:17	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan ***Tembusan :*** Muchtar Hadi Saputra (Pengolaha Data Perkara dan Putusan)	Disposisi (Biasa)	untuk dimonitor pelaksanaannya. Dari TIK via Kapustik sdh menyampaikan via tlp akan lsg ditindaklanjuti. tks	
6	23-06-2022 11:50:01	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Disposisi (Biasa)	Agar dikoordinasikan langsung ke IT	
7	23-06-2022 11:35:05	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengelola Instalasi TI (Agung Wisnu Laksono, A.Md.) ***Tembusan :*** Pranata Komputer Muda (Sri Haryanti),Pranata Komputer Ahli Pertama (Tarnoto),Kepala Subbagian Tata Usaha TIK	Disposisi (Biasa)	Mohon diberikan hak Akses ke Database Publik Administrasi Perkara Bagi Pengolah Data di YM Hakim Konstitusi sesuai dengan nota dinas Karo HAK. Terima kasih	
8	23-06-2022	Kepala Bagian Fasilitas dan	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi ***Tembusan :*** Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams (Amriansyah Maulana),Suryo Gilang Romadlon (Pengolah Data Perkara dan Putusan),Pengolah Data Perkara dan Putusan (Rika Dewi Andryani),Hersinta Setrarini (Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh),Pengolah Data Perkara dan Putusan pada	Nota Dinas	Yth. Kapustik. Mohon konfirmasi terkait tindak lanjut Pemberian Akses ke Database Publik Administrasi Perkara Bagi Pengolah Data di Hakim	

Type here to search
12:26 PM
6/27/2022

PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, serta keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset negara, perlu diterapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara terukur, efektif dan akuntabel, serta berlangsung secara terus menerus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, diperlukan suatu pedoman teknis bagi unit kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**.

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai acuan bagi unit kerja dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. pendahuluan;
b. gambaran umum sistem pengendalian intern pemerintah;
c. tahapan sistem pengendalian intern pemerintah;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. penutup.

Pasal 3

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, perkembangan, atau perubahan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk-151858130119120901430 9

e-Buku Tamu
Mahkamah Konstitusi RI

e-Buku Tamu

Mahkamah Konstitusi RI

Login

User Name

Password

Pilih loby

Gunakan NIP dan Password komputer anda untuk login.

Login

Copyright © 2020 Mahkamah Konstitusi, Biro Umum

e-Buku Tamu

Mahkamah Konstitusi RI

Statistik | Input Data Tamu | Laporan | Medan Merdeka Barat **Log Off**

Kembali

Form Buku Tamu

No. KTP	:		DEVICE CEK KTP BY PASS KTP *)
Nama Tamu	:		*)
Jenis Kelamin	:		*)
Pekerjaan	:		*)
Kewarganegaraan	:		*)
Kategori Pengunjung	:		*)
Tujuan Unit Kerja	:		
Pegawai yang dituju	:	NIP	Pilih
		NAMA	
Tanggal Datang	:	2022 06 27 Pukul : 11 : 26 WIB	
Tujuan Kunjungan	:		*)
Alamat	:		
Telepon	:		

Simpan

Copyright © 2020 Mahkamah Konstitusi, Biro Umum

Ruang Sidang Panel (Gedung 1)
27 Juni 2022 - 11:22:00 WIB
68/PUU-XX/2022

Mohon diisi dengan seksama!

Tabel Checklist - Kepaniteraan

No.	Kegiatan	Checklist		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Meng-input waktu mulai/selesai persidangan	◉	○	-
2.	Menyiapkan UUD, UU MK, dan PMK	◉	○	-
3.	Menyiapkan layout sidang	◉	○	-
4.	Menyiapkan daftar hadir Hakim	◉	○	-
5.	Menyiapkan formulir tenggat perbaikan permohonan (saat sidang pendahuluan)	◉	○	-
6.	Menyiapkan formulir pengesahan alat bukti (saat sidang perbaikan)	◉	○	-
7.	Menyiapkan formulir rekomendasi Panel Hakim (saat sidang perbaikan)	◉	○	-
8.	Menyiapkan formulir kesimpulan (saat sidang pleno)	◉	○	-
9.	Menyiapkan formulir penundaan sidang (saat sidang pleno)	◉	○	-
10.	Menyiapkan daftar hadir para pihak	◉	○	-
11.	Menyiapkan permen hakim	◉	○	-
12.	Mengecek palu sidang	◉	○	-
13.	Mengecek kitab suci dan peralatan sumpah	◉	○	-
14.	Mengecek papan nama hakim dan para pihak	◉	○	-
15.	Mengecek bendera dan lambang Garuda	◉	○	-
16.	Mengecek ATK	◉	○	-
17.	Mengecek jam meja	◉	○	-
18.	Mengecek kalender	◉	○	-
19.	Mengecek cover mic/delegate	◉	○	-
20.	Mengecek masker, hand sanitizer, dan disinfectan spray	◉	○	-
21.	Menampilkan layout sidang di monitor	◉	○	-
22.	Melakukan konfirmasi kehadiran kepada para pihak	◉	○	-

Petugas

× Siska Yosephin Sirait (Pengelola Persidangan) ×

Kembali

Simpan

E-Checklist

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

198204202009012006

••••

Masuk